

Penulis:

- Karmelia Stephanie Vollyta Liuw
- Marhaeni Luciana Mawuntu
- Andheralvi Isaiiah Lontoh

Afiliasi:

- Universitas Kristen Satya Wacana
- Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Korespondensi:

karmelialiuw07@gmail.com

© KARMELIA
STEPHANIE VOLLYTA
LIUW, MARHAENI
LUCIANA MAWUNTU,
ANDHERALVI ISAAH
LONTOH

DOI: 10.21460/
gema.2025.112.1526

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

Diterima:
22 Agustus 2025

Direvisi:
3 Oktober 2025

Disetujui:
10 September 2026

Terbit:
18 Oktober 2026

CHURCH AND GOVERNMENT RELATIONS IN THE *SI TOU TIMOU TUMOUM TOU* PHILOSOPHY

Construction of Politics Theology Based on Minahasan Culture

Abstract

This study examines the relationship between the church and the government through the Minahasan cultural philosophy Si Tou Timou Tumou Tou, which means “to live is to humanize others,” as the basis for constructing a contextual political theology. This value is regarded as capable of bridging the church’s spiritual interests and the government’s structural interests within an ethical and theological framework. The purpose of the study is to analyze the role of this philosophy in shaping patterns of interaction between the two institutions and its implications for the development of political theology rooted in local culture. The method employed is a literature study with a critical review of political theology, Minahasan cultural values, and the history of the church in Minahasa in the context of its relationship with the government. The findings indicate that integrating this cultural value strengthens relations, reduces potential conflicts, and shapes a church and government relationship concept that is humanitarian, egalitarian, transformative, and socially relevant.

Keywords: church, government, politics, *tumou tou*, theology.

RELASI GEREJA DAN PEMERINTAH DALAM FALSAFAH *SI TOU TIMOU TUMOUM TOU*

Konstruksi Teologi Politik Berbasis Budaya Minahasa

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relasi gereja dan pemerintah melalui falsafah budaya Minahasa Si Tou Timou Tumou Tou, yang berarti “manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain,” sebagai dasar konstruksi teologi politik kontekstual. Nilai ini dipandang mampu menjembatani kepentingan spiritual gereja dan kepentingan struktural pemerintah dalam kerangka etis dan teologis. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis

peran falsafah tersebut dalam membentuk pola interaksi kedua institusi dan implikasinya bagi pengembangan teologi politik berbasis budaya lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur dengan telaah kritis terhadap teologi politik, nilai-nilai budaya Minahasa, dan sejarah gereja di Minahasa dalam konteks relasinya dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya ini memperkuat relasi, dapat mengurangi potensi konflik, dan membentuk konsep relasi gereja dan pemerintah yang berorientasi pada kemanusiaan, kesetaraan, dan transformatif serta memiliki relevansi sosial.

Kata-kata kunci: gereja, pemerintah, politik, teologi, tumou tou.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang teologi politik kontemporer, narasi dominan cenderung membingkai relasi antara gereja dan pemerintah dalam istilah *top-down*. Maksudnya adalah ketika otoritas moral dan struktural gereja ditempatkan sebagai sumber ataupun alat legitimasi yang hanya berinteraksi dengan negara secara simbolik dan hanya sebagai instrumen yang mengiringi proses dilakukan oleh pemerintah. Relasi antara gereja dan pemerintah di Minahasa memiliki akar sejarah mendalam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Minahasa yang bermayoritas orang Kristen dengan populasi Kristen terbesar di Indonesia, memiliki sejarah yang melibatkan peranan gereja dalam kehidupan sosial masyarakat dan politik lokal.

Pola relasi *top-down* yang dikritik di atas bukan tanpa akar sejarah-pemikiran. Ia dapat ditelusuri pada genealogi teologi politik Barat, mulai dari Agustinus dalam *The City of God* yang memisahkan secara tajam “kota Allah” dari “kota duniawi” sekaligus membuka jalan bagi otoritas gerejawi untuk turut menata kekuasaan duniawi, dilanjutkan pada era Abad Pertengahan melalui model

corpus christianum yang menyatukan takhta dan altar dalam satu bangunan kekuasaan Kristen-Eropa, hingga doktrin dua kerajaan (*two kingdoms*) era Reformasi yang memisahkan otoritas rohani dan otoritas duniawi namun tetap menempatkan gereja sebagai institusi yang berhadapan-hadapan secara hierarkis dengan negara (Mamahit, 2000). Ketiga model ini, meski berbeda satu sama lain, sama-sama lahir dari konteks Kristen Eropa yang membayangkan gereja dan negara sebagai dua kekuasaan yang saling melegitimasi atau saling membatasi dari atas ke bawah. Penelitian ini tidak hendak memberikan sumbangan pemikiran tersebut, tetapi hendak menegaskan bahwa kerangka semacam itu tidak serta-merta relevan ketika dihadapkan pada konteks masyarakat adat seperti Minahasa, yang memahami relasi sosial bukan dari logika kekuasaan yang berhierarki, melainkan dari logika kekerabatan dan kesetaraan (*maesaan*). Berangkat dari titik pijak itulah penelitian ini menawarkan sebuah tawaran alternatif, yaitu sebuah teologi politik yang dibangun dari bawah (*bottom-up*), bersumber dari falsafah hidup masyarakat Minahasa Si Tou Timou Tumou Tou, sebagai kritik sekaligus pelengkap terhadap model-

model relasi gereja-negara yang berasal dari tradisi Barat tersebut. Perlu ditegaskan bahwa yang dikritik di sini adalah arus utama teologi politik Barat yang berwatak Konstantinian tersebut, bukan seluruh tradisi Barat tanpa kecuali, karena di dalam tradisi Barat sendiri terdapat pula suara-suara minoritas yang menggugat pola top-down itu, misalnya John Howard Yoder, yang justru akan dipakai dalam penelitian ini secara dialogis, untuk membaca dan mempertajam nilai-nilai lokal Minahasa.

Kehadiran para misionaris di Minahasa pada abad ke-19 membawa perubahan besar, tidak hanya dalam aspek spiritualitas, tetapi juga dalam bidang sosial dan pendidikan. Misi gereja khususnya GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa), bertekad mendirikan sekolah-sekolah untuk memfasilitasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan gereja yang menjadi fondasi pendidikan (Wagiu, Undap, and Rogahang 2021, 14). Minahasa sejak masa kolonial keberadaan gereja seperti *Indische Kerk* (gereja negara) telah digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai instrumen kekuasaan untuk mengontrol masyarakat. Gereja bahkan dijadikan sebagai pintu masuk pemerintah kolonial untuk mengatur dan mengawasi masyarakat lokal (Burdam et al. 2022, 1). Relasi yang terbangun antara gereja dan pemerintah di era kolonial menunjukkan bahwa terjadi sebuah ketegangan antara gereja dan pemerintah kolonial yang dalam hal ini memanfaatkan gereja untuk melegitimasi tindakan sosial dan politik pemerintah. Sementara itu ada pun penelitian yang menunjukkan di dekade terakhir bahwa institusi gereja bahkan ada yang mulai memperlihatkan kecenderungan untuk membentuk narasi tunggal yang hegemonik

dan menjadi instrumen bio-politik. Istilah bio-politik di sini menjelaskan cara kekuasaan negara modern mengatur dan mengelola kehidupan (biologis, kesehatan, dan perilaku) populasi, melainkan dipinjam secara analogis untuk menggambarkan gejala ketika otoritas gereja dipakai sebagai wahana untuk menata dan mengarahkan sikap serta perilaku sosial-politik jemaat demi kepentingan kekuasaan tertentu, sehingga gereja dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dalam kasus ini, gereja mulai menyuarakan atau menyampaikan sebuah narasi teologis yang dicampurkan dengan dukungan terhadap suatu kepentingan politik dan sosial tertentu (Kaat and Lauterboom 2025, 212). Kasus seperti ini menimbulkan ketegangan dalam masyarakat yang mulai mempertanyakan apa sebenarnya hubungan antara gereja dan pemerintah? untuk apa gereja dan pemerintah harus bekerja sama? dan bagaimana konsep relasi yang konstruktif dalam menjaga relasi antara kedua institusi ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali masih sulit untuk dijelaskan lewat narasi yang cocok dan mudah dimengerti oleh masyarakat jika ditanyakan kepada pemerintah maupun pihak gereja (pemimpin gereja), apalagi ada orang-orang Kristen yang terkadang masih sensitif jika mendengar tentang gereja yang berpolitik. Pada umumnya, para kaum awam melihat jika gereja sudah terus berelasi dengan pemerintah maka dianggap sebagai praktik politik dan itu merupakan hal yang melenceng bagi mereka. Warga gereja yang memiliki paham-paham seperti ini seringkali menganggap bahwa politik identik dengan nafsu kekuasaan yang kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingan sendiri (Arayunedy, Wijaya, 2022).

Di era kontemporer saat ini sering kali politik disalahartikan. Banyak yang menganggap politik itu “kotor”, politik diidentikan sebagai nafsu kekuasaan, namun nyatanya individu maupun entitas tertentu yang melakukan praktik politik itu sendiri yang membuat politik menjadi sesuatu yang ditentang atau masih sensitif didengar oleh masyarakat, sehingga gereja dan politik adalah dua hal yang tidak boleh berjalan bersama. Suatu hal yang penting untuk mengetahui tujuan politik yang sebenarnya, dimana politik dapat dikatakan baik ketika diaplikasikan dengan tujuan untuk membangun dan mementingkan kemajuan bersama dengan melangkah dan berproses bersama (Lontoh 2023, 2). Pada dasarnya tujuan politik tidak semata-mata terbatas pada ranah pemerintahan atau hanya membahas soal kekuasaan saja, melainkan juga memiliki relevansi bagi gereja dalam menunjang pertumbuhan serta perkembangan pelayanan yang lebih progresif dan transformatif. Adapun penelitian terdahulu yang menegaskan perlunya gereja terlibat secara aktif dalam ranah sosial-politik, termasuk membangun relasi strategis dengan pemerintah. Dalam Hayon yang memperjuangkan hak pengakuan kaum disabilitas menggeser cara pandang dari sekadar “*how to live with disability*” menjadi “*how to live in disability*”, ia menekankan bahwa gereja, sebagai komunitas iman, memiliki peran penting untuk berpolitik, bukan dalam arti mencari kekuasaan, tetapi terlibat aktif membangun politik kasih. Gereja dipanggil untuk melampaui pola belas kasih sepihak menuju keterlibatan horizontal yang berbagi kerentanan dan membangun solidaritas. Di sisi lain hal ini menunjukkan kesadaran kerja

kolektif dari semua entitas termasuk gereja dan pemerintah dalam melihat isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat (Hayon 2019). Teologi politik yang berlandas pada kasih melalui teladan kristus ini merupakan dasar dalam melihat dinamika yang terjadi antara gereja dan pemerintah, sehingga memberikan sumbangsih bagi gereja dan pemerintah dalam terhadap konsep relasinya. Dalam perspektif ini, gereja bukan hanya menjadi institusi yang mengurus urusan spiritualitas yang terpisah dari urusan publik, tetapi juga ada sebagai agen yang memberikan kesaksian dan pengajaran tentang menjaga kehidupan yang adil dan damai.

Salah satu suara kritis dari dalam tradisi Barat sendiri terhadap kecenderungan model top-down tersebut datang dari John Howard Yoder, yang pemikirannya akan diuraikan lebih rinci pada bagian pembahasan. Secara ringkas, baginya politik Yesus bukanlah soal perebutan kekuasaan, melainkan proses menciptakan interaksi sosial yang menekankan keadilan dan rekonsiliasi (Dear, 2011). Pandangan ini sama halnya dengan prinsip keadilan yang menegaskan tentang kesetaraan dalam sebuah negara. Dalam prinsip ini mengatakan bahwa kita wajib memperlakukan semua orang dengan adil sebagai tanda hormat kepada hak-hak mereka. Prinsip ini relevan dengan konsep etika politik di mana semua manusia memiliki martabat yang sama dan harus berkedudukan yang sama dalam masyarakat dengan hak-hak yang sama (Suseno 2016, 27–28). Ketika dalam etika politik secara normatif memiliki relevansinya dengan prinsip keadilan, maka pada dasarnya bagian lain dalam berpolitik adalah berlaku adil kepada sesama manusia. Lebih jauh lagi, John

Rawls dalam teorinya menjelaskan tentang keadilan yang hadir melalui kebajikan dari institusi-institusi sosial (*social institution*). Rawls berpendapat bahwa masyarakat harus memperoleh dan melakukan prinsip kesamaan yang adil dengan memiliki kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of speech and expression*), juga kebebasan beragama (*freedom of religion*) (Mathis and Shannon 2009, 139–41). Keadilan, kesetaraan dan politik saling berhubungan. Berpolitik tidak lepas dari keadilan dan kesetaraan, dan dalam hal ini setiap lapisan masyarakat memiliki kebebasan untuk berpolitik dan politik yang berdasar pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Politik yang berlandaskan nilai-nilai tersebut bukan sekadar instrumen perebutan kekuasaan, tetapi menjadi sarana membangun tatanan sosial yang menghargai martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam perspektif teologi politik, hal ini sejalan dengan misi gereja untuk mewujudkan kasih dan keadilan sebagai wujud nyata iman di tengah masyarakat.

Dalam masyarakat Minahasa kecenderungan melakukan prinsip-prinsip tersebut terasa masih terbatas, bahkan ketegangan relasi antara gereja dan pemerintah masih terjadi. Meskipun pemerintah sendiri telah memegang motto Sulawesi utara yang berbunyi “Si Tou Timou Tumou Tou” artinya “Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain”. Namun, realitas menunjukkan bahwa penerapan nilai tersebut dalam relasi antara gereja dan pemerintah belum sepenuhnya optimal. Ketegangan hubungan antar kedua institusi ini masih sesekali muncul, dipengaruhi

oleh perbedaan perspektif, kepentingan, maupun pendekatan dalam menangani isu-isu sosial di tengah masyarakat. Filosofi ini, jika diinternalisasikan secara konsisten, dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat kolaborasi antara gereja dan pemerintah. Salah satu penelitian yang memberikan contoh sederhana penerapan falsafah ini yang masih relevan ketika diaplikasikan dalam konteks pastoral keluarga, di mana relasi antar anggota keluarga dibentuk bukan karena kekuasaan, tetapi oleh karena kasih dan rasa hormat kepada sesama. Kesadaran ini ada karena pemahaman Tou (orang) Minahasa mengenai makna hidup bahwa hidupnya bukan hanya berkaitan dengan hidupnya sekarang ini, tetapi mengenai apa yang dilakukan di dunia dengan tujuan agar bisa hidup sesudah kematian di Kasendukan (di atas). Lewat paham-paham ini kesadaran untuk melakukan hal baik di dunia karena Tuhan (Empung Walian Wangko) telah lebih dahulu melakukan yang baik dalam hidup manusia. Hal ini berkaitan dengan kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka atau Tuhan Omnipresent. Tuhan adalah Tuhan yang fungsional dalam Tou, sehingga memotivasi Tou Minahasa (orang Minahasa) untuk melakukan yang terbaik di dunia (Mawuntu, Tumiwa 2025, 56). kehidupan sehari-hari orang Minahasa. Pendekatan serupa bisa diperluas lagi ke ranah sosial-politik melalui pengembangan teologi politik yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan itu masih relevan.

Motto ini yang merupakan sebuah falsafah orang Minahasa yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi (Tuela, Palar, and Kalintabu 2023) sejak dahulu menjadi prinsip orang Minahasa untuk mencapai manusia yang

beradab, dan dijuluki sudah menjadi “Tou”. Dalam konteks Minahasa filosofi tradisional Tou adalah identitas sosio-kultural warisan leluhur yang dikonstruksi untuk menjawab tantangan zamannya, dan kini diwariskan sebagai identitas bersama masyarakat Minahasa yang mampu merawat keragaman (Mawuntu 2017, 129–30). Falsafah ini juga menekankan tentang kesatuan (*maesaan*) atau prinsip egaliter yang memandang bahwa semua adalah satu “*esa*”, sama. Nilai-nilai budaya seperti ini seringkali terabaikan bahwa terlupakan karena masyarakat cenderung terbawa arus perkembangan zaman yang semakin pesat. Padahal, kondisi inilah yang membuat relasi antara gereja dan pemerintah di Minahasa masih sesekali kembali pada pola lama yang searah dari atas ke bawah, di mana gereja lebih sering diposisikan sekadar sebagai tempat mencari dukungan kekuasaan ketimbang sebagai mitra yang setara.

Fenomena relasi yang kadang harmonis namun juga rentan mengalami ketegangan antara gereja dan pemerintah di Minahasa menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini. Dalam hal ini memberikan sumbangsih terhadap konsep relasi gereja dan pemerintah berlandas pada perspektif teologi politik yang kemudian digabungkan dengan nilai kultural Minahasa “*Si Tou Timou Tumou Tou*”. Dalam rangka tidak hanya menjawab kebingungan mengenai esensi relasi yang kuat antara gereja dan pemerintah di Minahasa, serta sebagai panduan institusional dalam membangun kemitraan gereja dan pemerintah yang berdasar pada prinsip kemanusiaan, egaliter, dan relasi yang mutualis transformatif. Dalam kerangka teologi politik, penelitian ini mengusulkan sebuah pola hubungan yang bersifat mutualis transformatif.

Artinya, relasi tersebut tidak sekadar menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga dapat menjadi wadah menuju perubahan dalam masyarakat secara luas khususnya di Minahasa. Konsep ini menegaskan bahwa gereja dan pemerintah, meskipun memiliki peran dan mandat yang berbeda, tapi dapat membangun kemitraan strategis dan konstruktif yang saling memperkuat demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi, menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman teoretis dan konseptual yang komprehensif berdasarkan masalah yang diangkat (Madum et al. 2025, 77).

TEOLOGI POLITIK: DARI BARAT KE KONTEKS LOKAL

Pada dasarnya relasi antara lembaga keagamaan (gereja) dan negara (pemerintah) di Indonesia berdasar pada konsep pemisahan institusional namun tidak tegas seperti negara-negara sekuler lainnya. Indonesia bukan negara agama tetap juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang telah ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945

sebagai dasar utamanya yang menegaskan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, serta mengakui keberadaan agama-agama dan kebebasan dalam beragama tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun sekuler murni (Silitonga et al. 2023, 983). Hal ini nampak pada eksistensi gereja yang tidak hanya menjadi tempat peribadatan, tetapi juga memainkan peran dalam kehidupan sosial, pendidikan, bahkan dalam ranah politik.

Masyarakat seringkali beranggapan bahwa lembaga keagamaan (gereja) tak patut ikut serta dalam ranah politik. Pemahaman seperti ini membuat gereja menjadi mundur dalam memahami politik itu sendiri. Secara tidak langsung paham-paham seperti ini acap kali menciptakan dualisme dimana ada bagian suci dan ada bagian profan. Dualisme seperti ini seakan-akan membedakan politik yang terjadi dalam gereja dan diluar gereja, sehingga muncul pembedaan nilai dan norma-norma. Dalam hal ini politik yang tanpa sadar sudah terjadi di dalam gereja dianggap suci dan bersih, sedangkan politik di luar gereja dianggap bagian profan dan kotor (duniawi). Pemahaman yang acapkali belum tersalurkan ke masyarakat maupun jemaat yaitu politik yang merupakan sebuah upaya atau usaha untuk mengatur kehidupan bersama. Sederhananya, di mana pun satu individu hidup bersama entitas lainnya, maka aktivitas politik sudah terjadi karena dalam hal ini akan ada proses perjuangan bersama dalam mencapai sebuah tujuan dengan kepentingan bersama. Itulah mengapa gereja pada dasarnya telah melakukan aktivitas politik, di mana gereja sebagai lembaga tentu memiliki aturan-aturan di dalamnya dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama sesuai dengan apa yang

disebut tata gereja yang berlandas pada Firman Tuhan (Widjaja 2014, 125). Dapat dikatakan bahwa politik itu bukan hanya identik dengan pemerintah tetapi juga lembaga keagamaan seperti gereja. Relasi yang dibangun dengan pemerintah oleh gereja merupakan sebuah aktivitas politik yang tujuannya tentu untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat.

Di Minahasa dengan keberagaman yang ada dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda yaitu yang disebut *pakasaan*,

1. *Tou'nsea*, yang didalamnya terdapat walak Tonsea, Klabat atas, dan Likupang.
2. *Tou'mbulu*, yang di dalamnya terdapat walak Aris, Klabat di bawah, Manado, Negeri Baharuw, Kakaskassen, Tombariri, Tomohon, Sarongsong.
3. *Toulour*, yang di dalamnya terdapat Tondano, Remboken Kakas.
4. *Tou'n-Pakewa*, yang di dalamnya terdapat walak Langowan, Tompasso, Kawangkoan, Sonder, Tombassian, Rumoong (Pinontoan 2015, 107).

Dalam konteks masyarakat Minahasa, keragaman itu kompleks dan rumit namun juga menyimpan gesekan-gesekan dan potensi-potensi konflik berbasis agama dan etnis. Namun begitu, narasi bersama yang selalu berupaya mereka bangun dan kemudian narasi itu yang mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda agama dan asal leluhur. Narasi itu sudah membentuk sejarah hidup bersama lebih dari satu abad, yakni bahwa Tanah Minahasa adalah ruang hidup bersama yang harus dijaga dan itu diletakkan pada bingkai

sebagai sesama warga negara Indonesia (Ahnaf 2015, 110). Narasi budaya yang telah menjadi prinsip hidup masyarakat Minahasa tertuang dalam satu semboyan filosofinya yaitu “Si Tou Timou Tumou Tou” yang menggambarkan Tou Minahasa yang beradab. Manusia akan disebut beradab ketika kehidupannya penuh dengan kasih, menghormati dan menghargai, saling membantu, berdamai dan tidak berseteru apa pun latar belakangnya, karena semua adalah satu dan menyatu (*maesaan*). Nilai ini mengajarkan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, gotong royong, dan solidaritas dalam membangun kehidupan bersama.

Dalam perspektif teologi politik Barat, khususnya pemikiran Yoder yang telah disinggung sebelumnya, prinsip hidup masyarakat Minahasa yang terkandung dalam semboyan Si Tou Timou Tumou Tou memiliki relevansinya. Yoder menolak model relasi gereja-negara yang didasarkan pada dominasi politik atau sekadar legitimasi timbal-balik. Etika politik Yoder berdasar pada ketaatan dan keteladanan secara radikal kepada Yesus Kristus. Dalam pandangannya, Yoder merepresentasikan gereja sebagai sebuah *polis* yaitu sebuah komunitas yang berkumpul dan melalui praktiknya menjadi gambaran awal atau cerminan dari realitas Kerajaan Allah (Kaunang 2025, 264). Ia menekankan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi komunitas alternatif yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat, bukan sebagai penguasa atau pelengkap negara, tetapi sebagai saksi yang hidup melalui tindakan nyata. Menurut Yoder, gereja adalah sebuah (bagian dalam) masyarakat dan keberadaan ikatan persaudaraan di antara anggotanya menjadi wujud nyata cara menanggapi adanya

perbedaan serta memenuhi kebutuhan bersama. Lebih dalam lagi, kebersamaan tersebut merupakan tindakan tentang pemaknaan kasih dalam relasi sosial. Yoder juga menekankan bahwa perbedaan antara gereja dan negara bukanlah yang satu bersifat politis dan yang satunya lagi tidak, tetapi perbedaan yang dimaksud adalah keduanya bersifat politis dengan tindakan dan cara yang berbeda (Kaunang 2025, 265).

Sampai pada titik ini setidaknya ada tiga konsep yang saling bersinggungan meski berangkat dari basis argumentasi yang berbeda. Pertama, kritik atas dualisme suci dan profan yang menegaskan bahwa politik pada dasarnya adalah usaha mengatur kehidupan bersama, sehingga tidak dapat disterilkan dari ruang gerejawi. Sebab gereja sendiri, melalui tata gereja dan pengaturan kehidupan berjemaat, sesungguhnya sudah menjalankan aktivitas yang hakikatnya politis, maka klaim bahwa gereja adalah ruang suci yang harus bersih dari politik maupun politik dalam gereja adalah suci dan diluar gereja adalah hal yang profan menjadi tidak konsisten dengan kenyataan gereja itu sendiri. Kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dikemukakan Rawls, yang menuntut agar setiap tindakan politik, termasuk yang dilakukan gereja, haruslah berdasar pada penghormatan atas martabat manusia dan kesetaraan. Ketiga, eklesiologi Yoder yang menempatkan gereja sebagai *polis* alternatif yang menolak dominasi kekuasaan. Ketiganya bertemu pada satu simpul argumentatif yang sama, yaitu bahwa politik, baik yang dijalankan gereja maupun pemerintah, hanya akan sah sejauh ia melayani kemanusiaan dan menjunjung kesetaraan bukan untuk perebutan kekuasaan atau jabatan.

SI TOU TIMOU TUMOUMOU SEBAGAI NILAI KULTURAL DAN SPIRITUALITAS SOSIAL-POLITIK

Pemaknaan Tou dalam tradisi Minahasa mengandung nilai-nilai yang mendalam. Nilai-nilai kultural yang terkandung ini berkaitan dengan makna internal dari manusia Minahasa. Terdapat dua ucapan yang secara turun-temurun diwariskan kepada orang Minahasa yang diinterpretasikan sebagai sebuah nilai yang menjadi pondasi dalam bertindak dan berinteraksi. Kedua ucapan ini dijadikan sebagai sebuah filosofi yaitu yang pertama “Tou Tumou Mawuali Tou” artinya manusia hidup untuk menjadi manusia sepenuhnya, dan yang kedua “Tou Timou Tumou Tou” artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya (Mawuntu 2017, 129–30), atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Si Tou Timou Tumou Tou”. Filosofi ini merupakan rangkaian kata dari bahasa daerah Minahasa yaitu bahasa Tontemboan.

Falsafah ini bukan sekadar semboyan etis, melainkan pandangan dunia (*worldview*) yang memadukan dimensi kultural dan spiritual dalam tatanan masyarakat yang mempengaruhi kondisi sosial-politik masyarakat Minahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diwariskan turun-temurun melalui praktik budaya yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Lima nilai moral yang terkandung dalam falsafah ini, *masigi-sigian* (hormat dan salam), *masaali* (pelayanan), *ma-rukup* (solidaritas dan kesetaraan), *mapalus* (gotong royong), dan *masuat peleng/paumung* (kesepakatan penuh) telah menjadi fondasi dalam menjaga kohesi sosial, solidaritas, dan pembentukan

etika politik yang berpihak pada kemanusiaan (Raintung and Susanto 2021, 6).

1. *Masigi-sigian* (hormat dan salam). Dalam tradisi atau kebiasaan orang Minahasa, memberi hormat dan salam kepada orang lain merupakan sebuah nilai yang menggambarkan rasa saling mencintai atau mengasihi dengan cara berlaku baik kepada sesama baik dalam etnis yang sama maupun diluar etnis di manapun orang Minahasa pergi dan berada.
2. *Masaali* (pelayanan). *Masaali* adalah jawaban dari masalah hubungan. Masalah hubungan yang dimaksud ini bukan serta merta diartikan sebagai sebuah konflik dalam hubungan tetapi merujuk kepada bagaimana relasi yang harus dijaga dalam sebuah hubungan secara berkelanjutan tanpa harus terjadi konflik terlebih dahulu. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab moral dari individu terhadap sesamanya. Contoh konkret yang sederhana ketika seorang anak diberi tanggung jawab untuk merawat orang tuanya. Dalam hal ini menunjukkan adanya kewajiban moral yang dimiliki oleh anak-anak dan inilah bentuk dan perwujudan sederhana dari *masaali* (Raintung and Susanto 2021, 6).
3. *Ma-rukup* (Solidaritas dan kesetaraan). Istilah ini merupakan tindakan dan ekspresi individu maupun entitas lain dalam menjaga solidaritas. Dalam hal ini juga, *ma-rukup* merepresentasikan hubungan antara manusia yang menjunjung tinggi kesetaraan. Secara

turun temurun diwariskan oleh para petuah Minahasa perspektif tentang semua adalah satu atau biasa disebut “esa” (satu) serta KA-WANUA, Se-wanua atau Se-kampung (Sondakh 2003, 5–6). Prinsip yang secara turun temurun diwarisi ini menciptakan sebuah tradisi yang sangat melekat dalam masyarakat Minahasa dalam menjaga solidaritas. Dalam tindakannya, orang Minahasa biasa melakukan dengan cara berbagi kebutuhan materi kepada orang yang mengalami peristiwa kedukaan (Raintung and Susanto 2021, 7). Ini merupakan sebuah ekspresi sepenanggungan dengan sesama manusia baik dalam suka maupun duka. Sebuah tradisi yang sudah sangat melekat dan sudah secara turun temurun dilakukan oleh orang Minahasa dengan tujuan mencapai hubungan harmonis dalam tindakan yang diwujudkan dalam realitas sosial.

4. *Mapalus* (gotong royong). *Mapalus* mengandung nilai-nilai solidaritas yang terorganisir (Raintung and Susanto 2021, 7). Dalam masyarakat Tontemboan, praktik “*Mapalus*” dikenal dengan istilah “*Maendo*”. Secara etimologis, “*Maendo*” merupakan gabungan dari awalan “*ma*” dan kata dasar “*endo*” yang berarti hari atau matahari. Secara sederhana, “*Maendo*” (Manoppo and Mawuntu 2024, 204) dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan memanfaatkan hari untuk bekerja secara kolektif bersama-sama individu atau entitas lain. Sama dengan makna dari *ma-rukup* dalam menjaga solidaritas,

mapalus juga merupakan aktivitas ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja sama, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan interpersonal dalam Masyarakat (Jura, Simatupang, and Rumbay 2024, 2). Kegiatan *mapalus* adalah juga dapat berarti sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat, misalnya dalam membuka lahan pertanian, masyarakat dengan semangat gotong royong membantu keluarga untuk membuka lahan pertaniannya seperti ladang dan sawah (Turang et al. 2012, 2). Dalam tindakannya juga biasa dilakukan dalam acara-acara seperti pernikahan di mana semua orang yang ada di wilayah tersebut membantu keluarga untuk mempersiapkan setiap kebutuhan yang biasa juga disebut dengan istilah “*baku tulung*” (saling membantu) dalam membuat makanan dan lain-lain. Hal ini juga bisa bersifat saling membalas bantuan. Praktik *mapalus* ini memiliki beberapa jenis yaitu *mapalus* uang, *mapalus* tani, *mapalus* suka dan duka, kemudian *mapalus* masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan dalam masyarakat (Turang et al. 2012).

5. *Masuat peleng* atau *paumung* (kesepakatan penuh). *Masuat peleng* atau *paumung* yang merupakan cara orang Minahasa menangani konflik sosial. Dalam hal ini, membuat sebuah kesepakatan penuh untuk terus hidup dalam kedamaian dengan tujuan untuk mempertahankan dan membangun kembali kehidupan yang harmonis

dan hidup dalam kesatuan. Tindak ini merupakan usaha menenangkan konflik yang terjadi khusus dalam masyarakat Minahasa.

Kelima nilai moral ini merupakan gambaran hidup manusia yang sudah benar-benar menjadi manusia dalam pengertian orang Minahasa atau disebut sudah menjadi “Tou”, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi di sini bukan sekadar pengulangan makna beradab tersebut, melainkan implikasinya bagi teologi politik: kelima nilai itu sesungguhnya berfungsi sebagai kriteria etis untuk menilai sah atau tidaknya sebuah tindakan politik, baik yang dilakukan oleh gereja maupun pemerintah, karena keduanya sama-sama dituntut untuk tunduk pada prinsip kesatuan (*maesaan*).

Melalui kerangka teologi politik John Howard Yoder, nilai-nilai ini bukan hanya artefak budaya lokal, melainkan juga bentuk konkret dari *politics of Jesus* dimana politik alternatif yang menolak dominasi dan kekerasan, dan sebaliknya menghidupi pelayanan, kesetaraan, solidaritas, serta perdamaian. Bagi Yoder, gereja dan komunitas iman dipanggil untuk menjadi *polis* alternatif yang menata ulang relasi sosial dan politik berdasarkan keteladanan Yesus. Dalam praktiknya sendiri, Yoder menguraikan bahwa pada dasarnya gereja memiliki potensi besar dalam perbaikan masyarakat sekitar. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa gereja menciptakan cara-cara baru dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat yang kemudian dapat dilembagakan oleh negara (pemerintah) dan diambil alih oleh otoritas sekuler. Hal ini menggambarkan gereja sebagai “pelopor”

(Kaunang 2025, 266–67). Meski kesejajaran antara *politics of Jesus* oleh Yoder dan nilai-nilai Tou di atas tampak meyakinkan, kesejajaran itu tidak boleh diterima begitu saja sebagai kesamaan yang utuh, karena keduanya lahir dari akar antropologis dan pengalaman historis yang berbeda, di mana yang satu dari pengalaman gereja minoritas yang berhadapan dengan negara dalam konteks yang modern, satu lagi dari masyarakat adat yang hidup dalam kesatuan komunal sebelum negara modern hadir.

KONSTRUKSI TEOLOGI POLITIK BERBASIS NILAI LOKAL

Dalam kehidupan sosial masyarakat Minahasa, nilai Tou yang terkandung dalam semboyan *Si Tou Timou Tumou Tou* tidak sekedar menjadi semboyan tradisional, tetapi telah melekat dalam cara masyarakat menjalani kehidupannya dan membangun relasi dengan sesama. Nilai ini mencerminkan pandangan hidup yang berorientasi pada kemanusiaan dan diturunkan melalui kelima nilai moral yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya (Raintung and Susanto 2021, 6). Dalam konteks kerjasama atau relasi antara gereja dan pemerintah, kelima nilai ini menjadi fondasi yang mendorong terjadinya sinergi, bukan sebagai struktur buatan luar, tetapi sebagai hasil pembentukan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini tidak berhenti pada penyandingan tekstual antara konsep Yoder dan nilai Tou, melainkan menelusuri bagaimana nilai-nilai itu benar-benar terbentuk dan hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat

Minahasa. Teori dari Berger dan Luckmann mengenai konstruksi sosial (Sulaiman 2016) menawarkan sudut pandang untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal ini terbentuk dan membentuk tindakan kolektif dalam masyarakat. Proses terbentuk nilai Tou dalam Minahasa berkorelasi dengan pandangan Berger yang menekankan bahwa identitas sosial dan identitas individu saling terkait erat atau solid (Mawuntu 2017, 31–32). Hubungan terus memengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk sebuah keterkaitan, sehingga manusia sampai di tahap mengkonstruksi masyarakatnya bersamaan dengan identitas sosialnya. Proses ini melalui tiga tahap yaitu, eksternalisasi, objektivasi, internalisasi (Berger 1966, 10).

Dalam tahapan pertama, yaitu eksternalisasi, individu-individu di dalam masyarakat mulai mengekspresikan nilai-nilai tersebut melalui tindakan nyata berdasarkan subjektifnya sendiri yang disepakati bersama. Sebagai contoh, ketika pemerintah desa dan gereja mengadakan kegiatan pelayanan masyarakat, kerja sama itu tidak bersifat teknis semata, tetapi merupakan bentuk aktualisasi nilai *mapalus* dan *masigi-sigian* yang telah melekat dalam keseharian mereka. Tindakan ini menjadi sarana ekspresi budaya yang keluar dari individu dan menjadi bagian dari ruang sosial.

Selanjutnya, dalam tahap objektivasi, ekspresi budaya yang tadinya merupakan inisiatif individu atau kelompok mulai diterima secara luas dan dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial yang wajar. Kolaborasi antara gereja dan pemerintah tidak lagi dipandang sebagai hal baru atau luar biasa, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang normatif atau

ideal. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti *marukup* dan *masaali* telah menjadi pedoman bersama dalam mengambil keputusan, menyusun program pembangunan, dan mengelola konflik sosial secara adil dan bijaksana.

Tahap terakhir, yaitu internalisasi, mencerminkan bagaimana nilai-nilai Tou yang telah dibentuk secara turun temurun tersebut kemudian diresapi secara mendalam oleh setiap anggota masyarakat. Baik pelayan gereja, pemerintah desa, maupun masyarakat umum mulai memaknai peran mereka bukan hanya dari fungsinya masing-masing, tetapi sebagai bagian dari tugas moral dan spiritual yang berakar pada nilai *masuat peleng*. Mereka tidak hanya bekerja demi memenuhi tugas administratif, melainkan sebagai wujud pengabdian untuk kebaikan bersama. Proses ini menunjukkan bahwa konstruksi nilai tidak hanya membentuk sistem sosial, tetapi juga membentuk kesadaran pribadi setiap aktor yang terlibat.

Jika nilai-nilai budaya Minahasa seperti *masigi-sigian* (gotong royong spiritual), *masaali* (kepedulian bersama), *ma-rukup* (saling menopang), *mapalus* (kerja kolektif), *masuat peleng* (menyelesaikan konflik) (Raintung and Susanto 2021, 6) diintegrasikan ke dalam kerangka teologi politik John Howard Yoder, maka relasi pemerintah dan gereja dapat dikonstruksi sebagai hubungan kolaboratif yang bukan sekadar berbasis kepentingan administratif, tetapi berakar pada etos pelayanan dan keadilan. Yoder memang menolak gereja yang tunduk pada kekuasaan negara atau yang memisahkan iman dari kehidupan publik; baginya, gereja harus menjadi komunitas alternatif yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di

tengah masyarakat. Dalam konteks Minahasa, ini berarti gereja dan pemerintah dapat membangun model kemitraan yang setara, dimana pemerintah mengakui peran gereja sebagai mitra moral dan sosial, sementara gereja tidak hanya mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam program yang menghidupkan nilai *Si Tou Timou Tumou Tou* atau “manusia hidup untuk memanusiaikan sesama”. Bukan hanya berdampak kepada masyarakat tetapi juga terdapat manfaat timbal-balik antara gereja ke pemerintah maupun sebaliknya.

Dengan melihat relasi yang dibangun antara gereja dan pemerintah dari perspektif tiga tahap konstruksi sosial ini, dapat dipahami bahwa kerja sama tersebut tidak muncul secara instan atau atas dasar kepentingan, melainkan tumbuh dari nilai-nilai budaya lokal yang dikonstruksi melalui interaksi sosial yang berulang. Nilai *Si Tou Timou Tumou Tou* dan lima prinsip moralnya menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan fungsi antara gereja dan pemerintah, menjadikan relasi dan kolaborasi itu sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat Minahasa.

Namun demikian, peminjaman kerangka Yoder ke dalam konteks Minahasa perlu dilakukan secara kritis, bukan sekadar aplikatif. Yoder membangun eklesiologinya dari pengalaman gereja minoritas Anabaptis di tengah negara-bangsa modern Barat yang sekuler, sehingga penekanannya jatuh pada gereja sebagai *polis* alternatif yang menjaga jarak kritis, bahkan cenderung berhadapan, dengan kekuasaan negara demi menjaga kemurnian kesaksiannya. Penekanan ini tidak lepas dari latar sosiologis Yoder sendiri

sebagai bagian dari tradisi Anabaptis, kelompok minoritas Kristen yang sejak era Reformasi kerap diawasi, dicurigai, bahkan ditindas oleh gereja maupun maupun negara. Pengalaman sebagai pihak kecil yang tertekan inilah yang membuat Yoder membayangkan gereja bukan sebagai bagian dari struktur kekuasaan negara, melainkan sebagai komunitas tandingan yang harus menjaga jarak agar cara hidupnya tidak dikompromikan oleh logika kekuasaan. Pada titik ini terdapat ketegangan mendasar dengan konteks Minahasa, karena gereja dan pemerintah sama-sama tumbuh dari satu rahim kultural yang sama, yaitu masyarakat adat yang telah lama hidup dalam bingkai kekerabatan dan kesetaraan sebelum institusi gereja modern hadir. Dalam artian, jarak kritis oleh Yoder perlu dipertemukan, bukan dipertentangkan, dengan konsep *maesaan* yang justru menolak sekat tajam antara ranah gerejawi dan ranah publik. Titik temu keduanya terletak pada penolakan bersama terhadap kekuasaan yang koersif dan hegemonik. Dalam hal ini, baik Yoder maupun falsafah *Si Tou Timou Tumou Tou* sama-sama menegaskan bahwa otoritas apa pun, baik gerejawi maupun pemerintahan, hanya sah sejauh ia melayani dan memanusiaikan, bukan kepentingan jabatan dan kekuasaan. Titik bedanya terletak pada basis argumentasinya, di mana bagi Yoder legitimasi itu bersumber dari ketaatan radikal kepada teladan Yesus secara historis, sedangkan dalam konteks Minahasa legitimasi itu bersumber dari nilai kultural yang telah lama hidup dan diteguhkan secara teologis melalui pemahaman tentang Tuhan yang *omnipresent* dan fungsional dalam *Tou*. Dari titik temu dan titik beda inilah penulis mengambil posisi teologis bahwa relasi gereja dan pemerintah di

Minahasa sebaiknya tidak dipahami sebagai relasi oposisional sebagaimana kecenderungan sebagian pemikiran Yoder, maupun sebagai relasi subordinatif sebagaimana warisan model ala Barat, melainkan sebagai relasi mutualis-transformatif, yaitu, gereja dan pemerintah berdiri setara sebagai dua institusi dengan mandat berbeda namun berakar pada satu identitas kultural-spiritual yang sama, saling mengoreksi ketika salah satu pihak menyimpang dari nilai kemanusiaan, dan saling menguatkan ketika keduanya bergerak menuju kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Gereja berperan sebagai agen moral dan pembentuk karakter, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia sumber daya. Sinergi ini, ketika berlandaskan nilai-nilai kultural dan prinsip teologi politik, mampu menciptakan tatanan sosial yang harmonis, partisipatif, dan berkeadilan, sekaligus menjadi konsep kemitraan yang relevan untuk konteks masyarakat plural di Minahasa maupun Indonesia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Muhammad Iqbal. 2015. *Praktik Pengelolaan Keragaman Di Indonesia : Kontestasi Dan Koeksistensi*.
- Arayunedya, Semy, and Wijaya Calvin Nathan. 2022. "Kesadaran Kritis Sikap Politik Warga Gereja." *Peneliti Malang Corruption Watch (MCW)*. Jakarta. 2022. <https://reformed-crs.org/kesadaran-kritis-dan-sikap-politik-warga-gereja/>.
- Berger, Peter L. 1966. *The Sacred Canopy Elements Of A Sociological Theory Of Religion*. New York: Open Road Integrated Media.
- Burdam, Yohanes, Aksilas Dasfordate, Darmawan Edi Winoto, and Sendy Lely Merly. 2022. "The Church and Politics of Early 20th Centuries in Minahasa." *SHS Web of Conferences* 149:02049. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902049>.
- Dear, John. 2011. "John Howard Yoder's Political Jesus." NCR. 2011. <https://www.ncronline.org/blogs/road-peace/john-howard-yoders-political-jesus?utm>.
- Frinsly Kaat, Thiosani, and Mariska Lauterboom. 2025. "Normalization of Religious Hegemony as Destructive Narrative and Bio-Politics in Minahasa." *Jurnal Sosiologi Agama* 18 (2): 211–26. <https://doi.org/10.14421/jsa.2024.182-05>.
- Hayon, Yohanes Wele. 2019. "Disabilitas Dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme Ke Politik Kasih." *Inklusi* 6 (2): 235. <https://doi.org/10.14421/ijds.060203>.
- Jura, Demy, Pantjar Simatupang, and Christar A. Rumbay. 2024. "Embracing the Emic of Minahasa Celebration Culture and Christian Religious Education." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80 (1): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9523>.

- Kaunang, Desly. 2025. "Gereja Dan Negara Di Ruang Publik Minahasa: Analisis Eklesiologi John Howard Yoder Dan Konsep Pluralisme Kewargaan Terhadap Hubungan Gereja Dan Negara Di Minahasa." *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 4 (3): 257–76. <https://doi.org/10.21460/aradha.2024.43.1342>.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah. 2023. "Gereja Yang Memberdayakan: Teologi Politik Julianus Mojau Dan John Howard Yoder Sebagai Sumbangsih Pemikiran Terhadap Paham Politik Warga Gereja Masehi Injili Di Minahasa Terhadap Pengakuan Iman GMIM." Universitas Kristen Duta Wacana.
- Madum, Mohamad, S Sy, Ida Faridah, Septian Fiktor Riyantoro, Lodewyk Nahuway, S Sos, Eko April Ariyanto, Hartono Nurlette, S Pi, and Syaiful Amri. 2025. *METODOLOGI PENELITIAN*. CV Angkasa Media Literasi.
- Mamahit, Ferry Y. 2000. "KOTA ALLAH : SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGIS DAN FILOSOFIS TERHADAP SEJARAH" 2 (Oktober): 159–68.
- Manoppo, Yemima Imelda Margareth, and Marhaeni Luciana Mawuntu. 2024. "Mapalus Sebagai Model Relasi Solidaritas Kristen Dan Islam." *Educatio Christi* 5 (2): 201–8.
- Marhaeni Luciana Mawuntu, Jever Kivri Tumiwa, Hendry M. C. Runtuwene. 2025. "Lumales: Experiencing God Omnipresent in the Cultural Activities of Tou Minahasa Christians Today." *Educatio Christi*, 6 (1): 54–64. [file:///C:/Users/DJONNY PABISA/Downloads/159-Article Text-609-1-10-20250223 \(2\).pdf](file:///C:/Users/DJONNY%20PABISA/Downloads/159-Article%20Text-609-1-10-20250223%20(2).pdf).
- Mathis, Klaus, and Deborah Shannon. 2009. "John Rawls's Theory of Justice." *Law and Philosophy Library* 84:121–39. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9798-0_7.
- Mawuntu, Marhaeni Luciana. 2017. "Redefinisi Dan Rekonstruksi Tou Kajian Sosial Terhadap Identitas Sosial Minahasa Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Salatiga: Fakultas Teologi*.
- Raintung, Agnes Beatrix Jackline, and Daniel Susanto. 2021. "'SI TOU TIMOU TUMOU TOU': BERTEOLOGI PASTORAL KELUARGA DALAM KONTEKS BUDAYA MINAHASA DI TENGAH PERUBAHAN ZAMAN." *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling* 2 (1): 1–20.
- Silitonga, Marudut Parulian, John Pieris, Aartje Tehuperiory, and Narang Terrace. 2023. "The Role of the State in Maintaining the Relationship Between the Church and Society Based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *International Journal of Social Service and Research* 3 (4): 983–89. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.345>.
- Sondakh, A. J. 2003. *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger."

- Society* 4 (1): 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. “Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.”
- Tuela, Anita Inggrih, Yolanda Nani Palar, and Heliyanti Kalintabu. 2023. “Filosofi Sitou Timou Tumou Tou Merawat Manusia Dalam Bingkai Moderasi Beragama.” *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 4 (2): 253–67.
- Turang, I Treesye, Agus Suman, Jeany Mandang, and Soemarno. 2012. “Kajian Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Tomohon.” *Wacana* 15 (No. 4): 1–7.
- Wagiu, Meily Meiny, A P P Undap, and Heldy J Rogahang. 2021. “Development of Mission and Christian Education GMIM in Minahasa.” *International Journal of Education, Information Technology, and Others* 4 (1): 12–18.
- Widjaja, Paulus S. 2014. “PARTISIPASI KRISTIANI DALAM POLITIK DI INDONESIA 1 Antara Mitos, Realita, Dan Politik Yesus.” *Gema Teologi* 38 (2): 123–42.